

# Perbandingan Pengaturan Pendanaan Partai Politik di Inggris dan Filipina

---

## **PENYUSUN**

### **Analisis Legislatif Ahli Utama**

Drs. Prayudi, M.Si.

### **Analisis Legislatif Ahli Madya**

Debora Sanur Lindawaty, S.Sos M.Si.

### **Analisis Legislatif Ahli Muda**

Aryo Wasisto, M.Si.

Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P., M.Si.

### **Analisis Kebijakan Ahli Pertama**

Nurfadhilah Arini, S.I.P.

## **REDAKSI BIDANG**

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Novianti, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

## A. PENDAHULUAN

Pada sebuah sistem politik demokrasi, faktor pendanaan merupakan salah satu elemen penting. Akses yang memadai terhadap sumber pendanaan dibutuhkan oleh partai politik (parpol) dan politisi untuk menjangkau konstituen, sehingga dialog demokratis dapat terbangun (Falguera *et al.*, 2014). Secara bersamaan, pendanaan politik yang tidak terkontrol dan tidak diatur dapat menciptakan ketidaksetaraan pada arena kontestasi politik. Penyalahgunaan uang untuk memanipulasi proses politik juga dapat melemahkan responsivitas penguasa terhadap konstituen (Falguera *et al.*, 2014).

Dilatarbelakangi oleh posisi penting dan persoalan yang dapat ditimbulkan dari pendanaan politik, tulisan ini berupaya untuk menganalisis dan mendalami lebih lanjut isu pengaturan pendanaan politik. Falguera *et al.* (2014) menyebut bahwa secara umum pendanaan politik atau keuangan politik merujuk pada seluruh uang yang dilibatkan dalam proses politik sehingga ruang lingkup politik terkait uang pada dasarnya bersifat luas. Dengan demikian, tulisan ini akan membatasi pembahasan pendanaan politik yang ruang lingkungannya terkait pengaturan terhadap parpol. Pengaturan pendanaan parpol dipilih karena posisi krusial parpol terhadap demokrasi. Parpol berperan untuk mengartikulasikan kepentingan dan menyediakan sarana partisipasi politik bagi warga negara. Parpol juga memungkinkan kompetisi politik dalam

pemilu terorganisir melalui rekrutmen kandidat, memobilisasi dukungan masyarakat, hingga berkontribusi terhadap legitimasi sistem politik (Hofmeister, 2022). Levitsky dan Ziblatt (2018) menyebutkan bahwa parpol berperan kuat sebagai gatekeeper bagi demokrasi. Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus terhadap pengaturan pendanaan yang berkaitan dengan parpol.

Analisis dilakukan dengan membandingkan pengaturan pendanaan parpol di Inggris dan Filipina. Kedua negara dipilih untuk menggambarkan bagaimana pendanaan parpol diatur pada suatu negara dengan demokrasi yang telah mapan, serta pada negara yang pelaksanaan demokrasinya cenderung prosedural dengan dominasi segelintir elite. Sebagai negara dengan sejarah demokrasi tertua di Asia, Filipina masih dihadapkan pada persoalan kultur patron-klien yang cukup mengakar. Lanskap politik Filipina cenderung dikuasai oleh segelintir elite dari dinasti politik tertentu sehingga persoalan dana menjadi salah satu hal krusial bagi pembangunan demokrasi di Filipina (Arlegue & Coronel, 2002; Gonzalez, 2003; Reyes *et al.*, 2018). Sementara Inggris menjadi salah satu negara yang disebut memiliki pengaturan pendanaan politik paling baik, dibandingkan negara-negara lain di dunia (Falguera *et al.*, 2014). Namun, lanskap pendanaan parpolnya masih didominasi oleh ketergantungan terhadap pendanaan privat (Scarrow, 2016).

Pengaturan pendanaan parpol pada kedua negara ini pada hakikatnya menarik untuk dibahas, sebab akan

menggambarkan metode pengaturan seperti apa yang berlaku pada dua negara yang cenderung berbeda dan implikasinya terhadap arena kontestasi politik. Guna menggambarkan lebih dalam pengaturan pendanaan parpol di kedua negara, tulisan ini mengajukan pertanyaan mengenai (1) bagaimana pendanaan politik parpol diatur di kedua negara?; (2) bagaimana implementasi dari kebijakan pengaturan pendanaan parpol dijalankan?. Melalui pembahasan dan analisis terhadap dua pertanyaan tersebut, hasil komparasi diharapkan mampu menggambarkan model kebijakan atau aspek regulasi tertentu yang dapat ditransplantasi di Indonesia.

## **B. PERBANDINGAN PENGATURAN PENDANAAN PARTAI POLITIK**

### **1. NEGARA INGGRIS**

#### ***Pendanaan Partai***

Dalam klasifikasinya, bisa dinilai bahwa sejarah perkembangan kepartaian Inggris tergolong tumbuh dari dalam parlemen. Ostrogorski mencatat, perkembangan kepartaian demikian berangkat dari faktor lokal dan ideologis dari kepentingan perorangan juga mendapat tempat. Mekanisme partai yang tumbuh dalam lingkaran intra parlemen adalah cenderung terjadi secara sederhana. *Pertama*, pembentukan kelompok-kelompok parlemen, kemudian diikuti munculnya komite-komite pemilihan. *Kedua*, dari komite-komite pemilihan tadi akhirnya berkembang menjadi hubungan permanen antara kedua elemen itu. Untuk kasus Inggris, awalnya

korupsi diakui memainkan peranan yang tergolong cukup besar dalam kelompok-kelompok parlementer tadi. Meskipun dalam perkembangan kemudian sesudah tahun 1714, disiplin internal partai yang mulai membaik dan struktur kelompok-kelompok internal parlemen termasuk organisasi dan kewenangannya ditata lebih lanjut, maka partai-partai di parlemen Inggris juga memiliki peran kepeloporan yang baik bagi sistem politiknya (Amal, 2012, hlm. 4-5).

Dalam sistem pemerintahan parlementer majoritarian, kedudukan partai politik adalah sangat penting. Partai mayoritas mengendalikan pemerintahan dan secara umum melaksanakan tujuan kebijakan, sesuai dengan apa yang menjadi party manifesto. Dari berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945 sampai dengan tahun 1970 dua partai utama di politik Inggris, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif bisa meraih lebih dari 90 persen suara pemilih. Kedua partai utama tadi sukses secara bersama melalui kemenangannya di empat kali pemilu yang diselenggarakan dalam kurun waktu tersebut. Tetapi, sesudah tahun 1974, sistem multi partai tumbuh, yang termasuk munculnya kalangan tengah yang kuat, yaitu Partai Demokrat Liberal yang banyak memperoleh dukungan aliran nasionalis di Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara (O Neil, *et al.*, 2015).

Pentingnya posisi partai di pemerintahan, politik Inggris adalah politik partai, yang mengambil tempat secara fundamental sebagai sistem dwi partai. Sejak perang dunia kedua (PD

II), utamanya melalui Partai Konservatif dan Partai Buruh, sebagaimana peran yang signifikannya dalam politik Inggris. Pendaftaran partai politik menjadi penting dalam rangka kegiatan pendanaan partai politik. Sebagaimana tertera dalam *Political Parties, Election and Referendum Act 2000*, di Bagian IV ketentuannya, bahwa "Pendanaan partai politik bertujuan bagi

1. sejalan dengan dampak yang terjadi pada tujuan pendanaan partai politik itu sendiri;
2. setiap bentuk pemberian kepada partai politik apakah yang bersifat uang atau barang tertentu;
3. dukungan sponsor diberikan dalam hubungan partai; dan
4. setiap uang yang dibelanjakan (jika tidak sekedar oleh atau mengatasnamakan partai) untuk membiayai pengeluaran untuk perolehan keuntungan bagi partai (termasuk pelayanan bagi setiap orang)."

Pada ketentuan lebih lanjut UU kepartaian di Inggris tadi, juga diatur bahwa pendanaan berkenaan dengan kebajikan (*virtue*) dan bagi transfer oleh para *officer*, anggota, *trustee* agen bagi partai yang teregistrasi adalah menjadi referensi bagi organisasi pusat partai bersangkutan dan unit akutansinya.

Sistem pendanaan partai politik di Inggris tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan parlementernya. Pendanaan tadi dijalankan dalam rangka mendukung kerja partai-partai guna melaksanakan tugas-tugas keparlemenannya. Untuk di tingkat

Majelis Rendah (House of Common) dikenal apa yang disebut *short money*. Sementara di tingkat Majelis Tinggi (House of Lord) dikenal dengan *cranbore money* (UK Parliament, n.d).

*Short money* disediakan bagi partai-partai oposisi (non pemerintah) di Majelis Rendah yang mengamankan dua kursi atau 1 kursi sekalipun dan lebih dari 150.000 suara hasil pemilu sebelumnya. Dana *short money* tidak disediakan bagi partai yang para anggotanya tidak bersumpah di bawah sumpah. Bagaimanapun, keberadaan skema yang serupa bagi partai-partai oposisi diwakili oleh para anggota yang tidak dipilih tidak menempati kursinya, sebagaimana dipraktekkan oleh Sinn Fein yang mengklaim perbantuannya dalam Pemilu.

*Short money* sebagai bagian dari pendanaan politik partai selalu ditingkatkan setiap tahun. Misalnya, pada tahun 2014 besaran dananya meliputi komponen sebagai berikut.

1. *general money* guna membantu partai oposisi guna menjalankan kegiatan keparlemenan, partai memperoleh 16.689,13 poundsterling bagi setiap kursinya ditambah 33,33 poundsterling bagi 200 suara yang dimenangkan partai dari pemilu terakhir.
2. Pendanaan bagi perjalanan oposisi partai dan yang berasosiasi dengan pembiayaan kegiatan parlemen.
3. Pendanaan bagi kebutuhan pimpinan partai di operasional kantornya sehari-hari.

4. Di bawah pemberlakuan UU, partai politik yang teregistrasi hanya diperkenankan menerima sumbangan maksimal 500 poundsterling dari “donatur yang diizinkan, di mana donatur itu adalah baik sebagai individu yang terdaftar sebagai pemilih di Inggris, partai politik, perusahaan, serikat perdagangan, atau organisasi serupa yang terdaftar di negara tersebut.

Partai politik di Inggris sangat penting dalam membangun relasi dengan para pendukungnya di setiap tingkatan, bahkan organisasi yang terafiliasi dengan partai bersangkutan dan bahkan para pebisnis. Ini karena partai politik di Inggris dalam perkembangannya secara umum tidak memperoleh subsidi pendanaan dari pemerintah setempat yang maksimal. Inggris tergolong dominan bagi sumbangan swasta bagi pendanaan partai politiknya. Apabila merujuk pada perkembangan di dunia, banyak negara yang mengembangkan model subsidi negara tersebut. Misalnya, Inggris, Italia, dan Australia yang subsidi negara lebih kecil dibandingkan sumbangan. Sementara itu, Perancis, Denmark, dan Jepang subsidi negara sama dengan sumbangan nonnegara atau swasta. Austria, Swedia, dan Meksiko bantuan negara lebih besar dari sumbangan perorangan atau swasta setempat. Sementara itu, 100% pendanaan partai politik Uzbekistan berasal dari subsidi negara.

### ***Dukungan Keuangan***

Tidak seperti halnya organisasi partai lokal di Amerika Serikat, masyarakat pemilih atau konstituen di Inggris, mencoba tetap memberikan kemudahan dan operasional melalui waktu yang diberikan di antara pemilu, Mereka membantu mengerjakan hal ini oleh kebutuhan guna bersaing dalam pemilu lokal secara terjadwal dan kadang kala ketika diselenggarakan pemilu sela parlemen. Mereka mengandalkan bagi keberlangsungan keberadaannya menyangkut kepelangganan dan donasi, membuat mungkin bagi usaha kesukarelaan dan aktivitas penggalangan dana dari pekerja partai (Forman, 1985).

Partai Buruh, organisasi para pemilihnya memperoleh dukungan keuangan dari cabang perserikatan buruh setempat, dan dalam kasus tertentu anggota parlemen secara individual mensponsori dan mendukung secara keuangan melalui organisasi buruh tertentu. Untuk Partai Konservatif, dukungan bagi para konstituen juga diberikan melalui para pebisnis dan kepentingan komersial, meskipun ini juga bisa secara individual dan kegiatan pendanaannya yang bersifat sukarela. Kepengurusan partai itu di pusat berusaha memelihara kegiatan serupa di tataran konstituen guna mengadakan peran politik yang serupa, tetapi mereka sering kali berjuang untuk mempertahankan tingkatan yang tergolong giat bagi pendapatan dan dukungan. Ini bahkan lebih bagi Partai Demokratik Sosial kalangan David Owen (Owenite) yang kalah dalam hal

perolehan keanggotaan dan uangnya. Memang, ketika bukan sebagai sekedar kemurahan hati dari partai dari para dermawan nasional, maka partai tidak akan dapat untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara keseluruhan.

Sumbangan perusahaan ke partai berdasarkan sektor dan afiliasi politiknya, ternyata sebagian besar adalah mengalir ke Partai Konservatif.

Adapun perusahaan dalam kategori demikian, meliputi sektor (a) pertanian; (b) pertambangan; (c) manufaktur; (d) pengadaan gas; (e) pengairan; (f) eceran; (g) transportasi; (h) akomodasi; (i) komunikasi; (j) keuangan; (k) *real estate*; (l) ilmu pengetahuan; dan (m) lembaga ekstra kewilayahan.

Hanya pada sektor-sektor tentu, perusahaan penyumbang yang kebanyakan mengarahkan dukungan sumbangan donasi politiknya, untuk Partai Liberal Demokrat dan Partai Buruh. Ini meliputi perusahaan di sektor-sektor seperti halnya, pekerja sosial, seni, dan kategori pelayanan lainnya.

Pola pendanaan partai politik di Inggris cenderung sejalan dengan upaya membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan relatif tepat dengan perkembangan sosial kemasyarakatannya. Ini berlaku tidak saja bagi pengelolaan partai dalam hal urusan pendanaannya di tingkat nasional, tetapi juga bagi struktur kepengurusan partai di Inggris yang berada pada tingkatan daerah atau lokal.

Keterbukaan dan partisipasi publik dalam pendanaan kepartaian juga berlaku dalam pengelolaan belanjanya.

Ini juga sebagaimana diatur dalam *Political Parties*.

Menurut Elections and Referendums Act 2000 (PPERA) (The Electoral Commission, n,d), keseluruhan butir dan pelaporannya disampaikan kepada parlemen, yaitu meliputi parlemen Eropa, parlemen UK, parlemen Skotlandia, Irlandia Utara, dan Majelis Nasional Wales. Unsur-unsur belanja tadi sangat rinci berkenaan kampanye yang harus dilaporkan ke publik sebagai bentuk akuntabilitasnya. Ini termasuk biaya yang harus dikeluarkan terkait proses pencalonan kandidat dalam pemilu untuk menghindari bias atau bahkan yang bersifat manipulasi. Ini termasuk tuntutan bagi kesesuaian belanja aktual untuk kebutuhan iklan kampanye, seperti halnya berbentuk spanduk, baliho, dan sebagainya, dengan pelaporan dana kampanye iklan yang disampaikan kepada masyarakat.

Selama tahun kalender 2021, Partai Buruh melaporkan total pendapatan sebesar £45,6 juta dari biaya keanggotaan, sumbangan, dan bentuk pendanaan non-publik lainnya; Partai Konservatif £31,7 juta dan Partai Demokrat Liberal £5,7 juta. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah dana publik yang mereka terima.

Tidak ada batasan berapa banyak yang bisa disumbangkan ke partai politik atau politisi. Sumbangan dan pinjaman kepada politisi harus berasal dari 'sumber yang diperbolehkan'. Di Inggris Raya, hanya individu yang terdaftar dalam daftar pemilih Inggris yang dapat memberikan sumbangan. Perusahaan

Tabel 1

## Sumber-Sumber Pendanaan Partai Politik di Inggris

Sumber Pendanaan	Jenis	Tujuan	Batasan	Sanksi
Pendanaan publik	Hibah Pengembangan Kebijakan	Untuk pengembangan kebijakan, meningkatkan proses demokrasi, memastikan bahwa partai-partai politik memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan merumuskan kebijakan dengan baik (Bukan untuk kampanye/ operasional rutin).	Disesuaikan dengan jumlah suara yang diterima suatu partai pada pemilu terakhir. Diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan diwajibkan transparan dan akuntabel.	Harus ada laporan tertulis atas setiap penggunaan. Komisi Pemilihan Umum dapat menyelidiki kejanggalaan korupsi dengan hukuman berupa pengembalian, denda, dan proses hukum sebagai tindak kriminal.
	<i>Short Money</i>	Untuk mendukung partai oposisi dalam menjalankan bisnis parlemennya. Dana ini dapat digunakan untuk pengeluaran seperti gaji staf, riset, dan biaya administrasi. Dana ini tidak dibolehkan untuk dana kampanye politik.	Diberikan kepada partai yang memiliki minimal 2 kursi di House of Commons atau 1 kursi yang memiliki lebih dari 150.000 suara.	distribusi diawasi Parlemen Inggris dan jumlah yang dialokasikan ditinjau ulang setiap tahun. Partai-partai yang mengklaim short money wajib memberikan sertifikat auditor yang menegaskan bahwa semua biaya dikeluarkan secara eksklusif sehubungan dengan urusan parlemen partai tersebut.
	<i>Cranborne Money</i>	Untuk mendukung partai oposisi di House of Lords. Dana ini untuk mendukung oposisi dalam tugas parlemen mereka seperti pengawasan pemerintah, mengembangkan kebijakan, dan perdebatan bidang politik. (tidak boleh digunakan untuk kampanye)	Pembagian berdasarkan jumlah rekan dan tingkat aktivitas suatu partai di <i>House of Lords</i> .	Diawasi oleh House of Lords. Penyalahgunaan Cranborne Money, yakni pengembalian uang, denda, dan penyelidikan kriminal.

Sumber Pendanaan	Jenis	Tujuan	Batasan	Sanksi
Sumbangan	Sumbangan berupa uang, barang, dan jasa.	Untuk mendukung kegiatan partai politik.	Donasi diterima dari pemilih, perusahaan, serikat pekerja, asosiasi, dan masyarakat terdaftar di Inggris. Ada pembatasan jumlah donasi agar tidak ada donor tunggal yang terlalu berpengaruh. Pendonor berhak tetap anonim di bawah batas tertentu, tetapi identitas harus diungkap untuk donasi besar.	Partai politik diwajibkan melaporkan semua sumbangan, baik tunai maupun non-tunai, kepada Komisi Pemilihan Umum. Rincian sumbangan ini dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jika suatu partai politik menerima sumbangan dari sumber yang tidak diperbolehkan, partai tersebut harus mengembalikan sumbangan tersebut dalam waktu 30 hari sejak diterimanya.
Pinjaman	Pinjaman	Perjanjian keuangan oleh partai politik dengan pemberi pinjaman. Pinjaman harus dilunasi sesuai dengan ketentuan perjanjian.		Jika suatu partai politik menerima sumbangan dari sumber yang tidak diizinkan, partai tersebut diwajibkan mengembalikan sumbangan tersebut. Komisi Pemilihan Umum memberikan panduan untuk memastikan pemahaman aturan bagi partai politik dan pemberi sumbangan. Ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut akan dikenai sanksi.
Iuran Anggota	Iuran rutin	Bentuk pendapatan partai politik dari iuran anggota.	Iuran ini tidak tunduk pada aturan yang berlaku. Pendanaan ini dianggap sebagai urusan pribadi partai politik.	

yang terdaftar di Inggris, dan beberapa organisasi yang terdaftar di Inggris (seperti serikat pekerja) juga merupakan sumber yang diperbolehkan. Di Irlandia Utara, 'sumber yang diperbolehkan' juga mencakup warga negara Irlandia dan perusahaan yang terdaftar di Irlandia. Partai politik bertanggung jawab memeriksa sumber pinjaman dan sumbangan untuk memastikan berasal dari sumber yang halal. Mereka harus mengembalikan sumbangan dan pinjaman jika mereka tidak yakin dengan identitas pemberi atau pemberi pinjaman.

Dominasi sumber dana kampanye yang berasal dari kandidat tercermin pada dua pemilu terakhir (2014 dan 2019). Pada pemilu DPR tahun 2014, sebagian besar penerimaan dana kampanye berasal dari calon anggota legislatif. Merujuk pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu DPR Tahun 2014, sebanyak 85,1% atau 2,5 miliar rupiah dari total penerimaan dana kampanye yang diperoleh 14 partai politik peserta pemilu berasal dari calon anggota DPR. Sementara sumber penerimaannya berasal dari partai politik hanya 13,3% dari total partai politik peserta pemilu DPR tahun 2014. Tingginya sumbangan dana kampanye yang berasal dari calon pribadi anggota legislatif juga terjadi pada pemilu serentak 2019. Besaran penerimaan dana kampanye yang berasal dari calon pribadi anggota DPR adalah sebesar 1,9 miliar rupiah atau 84,7% dari total penerimaan dana kampanye 16 partai politik peserta pemilu. Sementara itu,

sumber penerimaan dari partai politik dan pihak ketiga, baik dari perseorangan, kelompok, maupun perusahaan swasta, relatif rendah.

Ada beberapa aktivitas yang dapat menghindari larangan dan batasan donasi. Di beberapa negara, kandidat diperbolehkan mendanai kampanyenya sendiri (*self-funding*). Demikian pula, partai politik dan kandidat terkadang diperbolehkan untuk mengambil pinjaman; ini mungkin dianggap sumbangan pribadi yang tersembunyi. Beberapa partai politik juga diperbolehkan melakukan aktivitas komersial dan menggalang dana dari bisnis tersebut.

Di Indonesia, partai politik dilarang mendirikan badan usaha atau memiliki saham pada suatu badan usaha. Secara umum, jika pendanaan mandiri, pinjaman dan kegiatan komersial oleh partai diperbolehkan, maka akan lebih penting lagi jika partai politik dan kandidat diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai kegiatan tersebut untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan politik.

## **2. NEGARA FILIPINA**

Pada kasus di Filipina, uang memainkan posisi sentral dalam proses politik yang cenderung didominasi oleh kelompok elit. Studi Reyes et al. (2018) memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara jumlah pengeluaran kampanye dengan jumlah suara bagi kandidat senator di Pemilu Legislatif. Studi ini

menggarisbawahi posisi penting uang dalam proses pemilu di Filipina, bahkan ketika dibandingkan dengan faktor-faktor pendukung kemenangan lain seperti posisi sebagai petahana, dinasti politik, serta keanggotaan pada partai politik (Reyes *et al.*, 2018). Temuan tersebut mendukung asumsi bahwa ketersediaan dana dalam proses politik memungkinkan parpol dan kandidat menjangkau pemilih, sekaligus menyorot berbagai macam isu terkait pendanaan—e.g., akses yang setara terhadap sumber pendanaan, transparansi sumber pendanaan, serta pengaruhnya terhadap proses politik secara keseluruhan. Beberapa isu terkait pendanaan ini menjadi penting khususnya ketika melihat biaya pemilu yang tinggi di Filipina, didukung dengan kultur patron-klien yang mengakar (Arlegue & Coronel, 2002; Gonzalez, 2003).

Pada konteks legal-formal, pengaturan mengenai pendanaan politik di Filipina berpusat pada pelaksanaan pemilu. Studi terdahulu menyebutkan bahwa terdapat celah regulasi yang mengatur parpol di Filipina, sebab belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur partai kecuali berkaitan dengan aktivitas pemilu (Aceron, 2009; Arlegue & Coronel, 2002). Artinya, sirkulasi pendanaan dalam politik di Filipina diatur dalam kerangka kerja peraturan perundang-undang terkait pemilu.

Pengaturan mengenai pendanaan politik di Filipina merupakan turunan dari amanat Konstitusi Filipina Tahun 1986. Pasal II ayat 26 Konstitusi Filipina

mengatur bahwa negara wajib menjamin akses yang setara terhadap pelayanan publik, serta melarang dinasti politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Konstitusi Filipina, 1986). Secara bersamaan, Konstitusi Filipina Tahun 1986 juga mengatur sistem proporsional party-list yang melengkapi sistem pluralitas dalam pemilunya sebagai bagian dari upaya menjamin akses setara pada proses politik (Miranda, 2021). Pada konteks pendanaan politik, upaya untuk menjamin kesetaraan akses terhadap proses politik diatur dalam serangkaian peraturan.

*Omnibus Election Code* (OEC) menjadi peraturan perundang-undangan utama yang mengatur mengenai pendanaan dalam pemilu di Filipina. Peraturan mengenai pendanaan politik pada pemilu di Filipina juga diatur melalui Republic Act (RA) No. 9906, RA No. 7166, serta beberapa resolusi yang dikeluarkan Commission on Elections (COMELEC) Filipina—termasuk RA No. 11027 yang mengamandemen aturan mengenai tarif mengenai iklan politik pada RA No. 9006 (Aceron, 2009; Aceron & La Viña, 2018; Reyes *et al.*, 2021). Keseluruhan peraturan tersebut secara umum mengatur empat komponen terkait pendanaan politik pada pemilu, yaitu (1) pengaturan mengenai kontribusi pada pemilu—bagaimana kontribusi dapat diberikan dan siapa yang tidak diperbolehkan memberikan kontribusi; (2) pendanaan publik—apa yang dapat disediakan oleh negara dan tidak dapat disediakan oleh negara; (3) pembatasan

mengenai pengeluaran bagi kandidat dan parpol untuk pemilu; serta (4) pengawasan pendanaan kampanye.

### ***Pengaturan Mengenai Kontribusi***

Pasal 11 ayat 94 Batas Pambansa atau OEC Filipina mendefinisikan kontribusi pemilu, antara lain, (1) pemberian hadiah, donasi, sumbangan (*subscription*), pinjaman (*loan*), uang muka (*advance*) atau deposit berupa uang atau sesuatu yang berharga lainnya; (2) seluruh kontrak, janji, atau perjanjian yang berkontribusi mempengaruhi pemilu—tanpa mempertimbangkan kekuatan hukum dari keseluruhan kontrak, janji, atau perjanjian tersebut; dan (3) penggunaan seluruh fasilitas yang secara sukarela didonasikan oleh individu, kemitraan, komite, asosiasi, korporasi, serta organisasi atau kelompok lainnya.

OEC juga mengatur larangan pihak-pihak tertentu untuk memberikan kontribusi terhadap kandidat dan/atau parpol pada pemilu di Filipina. Pasal 11 dari ayat 95 secara khusus menyebutkan beberapa pihak yang dilarang untuk memberikan kontribusi, mulai dari institusi finansial, institusi pendidikan, pihak asing, dan pihak-pihak lain sebagaimana diatur. EOC turut melarang penggalangan dana pada periode pemilu berlangsung melalui ayat 97. Namun, EOC tidak mengatur mengenai pembatasan kontribusi terhadap kandidat atau parpol.

Ayat 98 dan 99, sementara itu, mengatur hal terkait pelaporan kontribusi sebagai upaya menjamin transparansi.

Ayat 98 melarang pemberian kontribusi tanpa nama terhadap kandidat atau parpol. Sementara ayat 99 secara khusus mengatur kewajiban bagi kandidat atau parpol untuk melaporkan seluruh kontribusi yang diterima. RA No. 7166 secara lebih detail mewajibkan kandidat atau parpol untuk menyerahkan laporan mengenai kontribusi dan pengeluaran, *Statement of Contribution and Expenditures* (SOCE), paling lambat 30 hari setelah pemilu. Melalui RA No. 7166 telah diatur sanksi bagi kandidat atau parpol yang tidak melaporkan SOCE berupa denda administratif dan larangan untuk menjabat (Ayat 14 RA No. 7166, 1991).

Pada konteks pendanaan publik, Filipina tidak memiliki dukungan pendanaan dari negara secara langsung terhadap kandidat atau parpol dalam bentuk subsidi. Pasal 22 ayat 2610 EOC melarang penggunaan dana atau fasilitas apapun dari negara untuk kebutuhan kampanye. Namun, RA No. 9006 sebagaimana diamandemen RA. 11027 dinilai menggambarkan dukungan tidak langsung yang diberikan negara kepada kandidat dan parpol. Melalui aturan tersebut, negara mewajibkan entitas media untuk menyediakan potongan tarif iklan politik bagi parpol dan kandidat dalam pemilu.

### ***Pengaturan Mengenai Pengeluaran***

Aspek lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan politik di Filipina adalah pembatasan pengeluaran pada masa kampanye. Sebagai konsekuensi

dari kerangka regulasi yang mengatur pendanaan politik hanya dalam konteks pemilu, tidak ada pengaturan mengenai pembatasan pengeluaran di luar masa kampanye bagi kandidat dan parpol di Filipina. Pada konteks pengeluaran, RA 7166 atau *Elections and Electoral Reforms Law of 1991* menetapkan batasan pengeluaran kampanye. Kandidat presiden, wakil presiden dan Senat diperbolehkan mengeluarkan tidak lebih dari 10 (sepuluh) Peso untuk setiap pemilih yang terdaftar. Sementara itu, semua kandidat lainnya diperbolehkan membelanjakan maksimal 3 (tiga) Peso setiap pemilih yang terdaftar di daerah pemilihannya. Parpol dapat membelanjakan maksimal 5 (lima) Peso untuk setiap pemilih yang terdaftar di daerah pemilihan tempat partai mengajukan kandidat. Jika seorang kandidat tidak berafiliasi dengan parpol manapun, diperbolehkan membelanjakan maksimal 5 (lima) Peso untuk setiap pemilih terdaftar di daerah pemilihannya (Arlegue & Coronel, 2002).

Ufen (2016) menilai bahwa nominal pembatasan penggunaan dana kampanye bagi kandidat di Filipina, khususnya bagi kandidat presiden, dianggap terlalu rendah. Hal tersebut justru menyebabkan tidak ada kandidat yang mematuhi regulasi tersebut. Secara bersamaan, COMELEC Filipina juga mengakui bahwa regulasi tersebut terlalu ketat. Pembatasan pengeluaran yang terlalu rendah dan regulasi yang terlalu ketat dapat melumpuhkan aktivitas kampanye politik. Selain itu, batasan yang terlalu ketat memberikan

potensi bagi partai/kandidat untuk melanggar regulasi itu sendiri. Di sisi lainnya, batasan yang terlalu longgar juga dapat menjadi kontraproduktif.

Pada kongres ke-15, The House of Representative of Philippine melakukan upaya penguatan sistem partai politik yang dimasukkan ke dalam RUU Pembinaan Partai Politik Tahun 2010. Senat dan DPR Filipina berencana akan meningkatkan batasnya masing-masing menjadi PHP 20.00 dan PHP 11.00 karena faktor ekonomi seperti inflasi (Office of The Ombudsman, 2013). Pada tahun 2021 Senator dan Kongres Filipina melalui Draft UU Keuangan Partai Politik mengusulkan bahwa setiap parpol nasional hanya boleh menghabiskan dana kampanye sebesar 20 peso atau Rp.5.858 per pemilih yang ada di DPT dapil kandidat. Besaran itu dapat disesuaikan kembali oleh COMELEC berdasarkan Indeks Harga Konsumen setiap tiga (3) tahun setelah berlakunya UU yang kini dibahas (Salabi, 2021).

Pengaturan mengenai pendanaan politik di Filipina, selain itu, tidak mewajibkan kandidat untuk melakukan deklarasi aset dan liabilitas. Peraturan di Filipina juga tidak mensyaratkan ada pelaporan catatan keuangan kepada publik atau badan pemerintah. Namun demikian, sebagaimana kewajiban melaporkan seluruh kontribusi yang diterima, kandidat dan parpol di Filipina diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan untuk semua pengeluaran kampanye kepada COMELEC. Laporan tersebut juga wajib dipublikasikan (Arlegue & Coronel, 2002).

### **Mekanisme Pengawasan**

Berbeda dengan negara-negara lain di Asia, Filipina dan Malaysia tidak mewajibkan parpol untuk menyerahkan laporan keuangan secara reguler (Ufen, 2016). Di Filipina tidak ada persyaratan untuk catatan keuangan yang rinci atau audit berkala dari berbagai pihak untuk diserahkan kepada COMELEC atau badan pemerintah lainnya. Para kandidat tidak perlu mengungkapkan pendapatan, pengeluaran atau pencatatan keuangan kepada masyarakat di luar masa pemilu. Namun demikian, kandidat dan bendahara dari semua partai politik wajib menyerahkan SOCE kepada COMELEC. SOCE wajib mencantumkan nama kontributor, meskipun kontributor tersebut adalah anonim. Akun-akun tersebut menjadi bagian dari catatan publik selama 3 (tiga) tahun (Arlegue & Coronel, 2002). Laporan tersebut sayangnya hanya mencakup pendapatan dan pengeluaran terkait pemilu. Sifat sistem politik yang informal di Filipina semakin menyulitkan upaya pengawasan pendanaan partai dan kampanye pemilu, kerangka kerja regulasi juga sering kali hanya ada di atas kertas saja (Ufen, 2016).

Arlegue & Coronel (2002) juga mengungkap bahwa dalam praktiknya, aturan terkait pendanaan pada pemilu di Filipina jarang sekali dapat diterapkan. Terlepas dari cakupan tanggung jawabnya, COMELEC hanya mempunyai sedikit sumber daya untuk memberikan pengawasan yang efektif. Pengawasan COMELEC terhadap keuangan kandidat dan partai politik dianggap tidak

transparan. Laporan keuangan kandidat jarang sekali diperiksa meskipun ada keraguan besar dari masyarakat mengenai seberapa akurat laporan pengeluaran yang sebenarnya. Selain mengalami masalah dalam memverifikasi laporan keuangan, COMELEC juga sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menegakkan pernyataan tersebut sejak awal. Contohnya, pada pemilu 1998, hanya empat partai yang mengajukan laporan kontribusi dan pengeluaran mereka, dan pada tahun 2001 tidak ada partai yang menyampaikan laporan keuangan (Arlegue & Coronel, 2002).

Terkait dengan sanksi yang diterapkan apabila anggota partai menerima dana dari sumber ilegal, anggota partai tersebut dapat dikeluarkan dari partai tersebut. Namun demikian, tidak ada seorang pun yang pernah dituntut atas pelanggaran tersebut (Arlegue & Coronel, 2002). Kelompok keuangan partai bertanggung jawab atas pengelolaan dana partainya. Partai melaporkan sumber dananya (jika tersedia) kepada para anggotanya melalui laporan dari bendahara. Namun, laporan tersebut tidak tersedia untuk umum dengan alasan tidak adanya aturan dan pedoman dari pemerintah untuk proses tersebut (Arlegue & Coronel, 2002).

Selanjutnya, pada kongres ke-15 DPR Filipina melakukan upaya penguatan sistem partai politik yang dimasukkan ke dalam RUU yang berjudul "Undang-Undang Pembinaan Partai Politik Tahun 2010". Salah satu langkah yang diusulkan adalah merinci pengeluaran apa yang

diperbolehkan untuk dibiayai dari dana subsidi negara. Pengeluaran ini tunduk pada Commission on Audit's (COA). Subsidi negara harus digunakan secara langsung untuk pengembangan partai dan kebutuhan kampanye (Office of The Ombudsman, 2013).

Filipina juga memiliki media dan masyarakat sipil yang dinamis. Media dan masyarakat sipil berperan sebagai pengawas. Namun demikian, pada masa pemerintahan Marcos media diintimidasi agar membela kediktatoran. Seiring dengan berakhirnya rezim Marcos, jumlah media semakin banyak dan menjadi bagian penting bagi keberhasilan pemilu (Arlegue & Coronel, 2002).

### **C. EVALUASI KRITIS DAN ANALISIS PREDIKTIF**

#### **1. NEGARA INGGRIS**

Meskipun dalam momentum tertentu bisa terjadi penyimpangan atau skandal korupsi di politik Inggris, tetapi bisa dikatakan fundamental kepartaian di Inggris tergolong kuat dalam menopang demokrasi berlandaskan kedaulatan rakyat secara fair dan akuntabel. Ini juga tercermin dalam sistem pendanaannya yang menguatkan pada sistem politik dalam peran negara tersebut bagi awal mula lahirnya konsepsi dan nilai-nilai HAM sejak tahun 1215 yang ditandai dengan suatu perjanjian bersejarah disebut sebagai Magna Charta, antara raja Inggris saat itu, John (John Lackland pen.), dengan para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar, seperti halnya antara lain hak untuk diperiksa di muka hakim (*habeas corpus*) (Budiarjo, 2018). Di tengah perjalanan transformasi kekuasaan pemerintahan dan rakyat tadi, maka pendanaan di Inggris memiliki sejarah yang panjang dalam konteks upaya membangun sistem politiknya yang demokratis. Sistem politik tersebut tidak terlepas dari perkembangan kepartaiannya yang kuat dengan sistem parlementer. Di samping itu, juga sistem monarki konstitusional Inggris yang menolak penggunaan kekuasaan absolut penguasa kerajaannya.

Undang-Undang Partai Politik, Pemilu dan Referendum tahun 2000 (PPERA) mewajibkan partai-partai yang terdaftar untuk melaporkan sumbangan dan pinjaman tunai dan non-tunai kepada Komisi Pemilihan Umum setiap triwulan. Partai politik harus melaporkan semua sumbangan dan pinjaman lebih dari £7.500 yang berkaitan dengan partai pusat, atau lebih dari £1.500 yang berkaitan dengan unit akuntansi. Ini mencakup kumpulan sumbangan dan pinjaman dari sumber yang sama selama tahun kalender. Setelah partai pusat melaporkan sumbangan atau sumbangan agregat lebih dari £7.500, partai tersebut harus melaporkan setiap sumbangan berikutnya yang berjumlah lebih dari £1.500 dari sumber tersebut.

Karena partai-partai hanya melaporkan sumbangan dan pinjaman yang melebihi ambang batas tersebut, maka angka tersebut tidak mencakup

seluruh sumbangan dan pinjaman kepada partai politik. Sumbangan dan pinjaman di bawah ambang batas ini dicatat dalam rekening tahunan partai politik. Inggris termasuk keras dalam menerapkan larangannya terhadap pendanaan ilegal atau uang hasil kejahatan, termasuk kemungkinan donasi asing. Misalnya, dari Rusia, untuk kepentingan investigasi (*dirty money*) mata-mata dalam Pemilu dan pemerintahannya. Ini dianggap sebagai dana kotor yang harus dihindari dan bisa terkena sanksi keras bagi partai politik yang melakukannya demi kepentingan elektoral atau elitnya sekalipun. Keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi kata kunci bagi langkah-langkah pencegahan dan sekaligus penanganannya terkait politik pendanaan partai-partai politik di Inggris untuk tidak dimanfaatkan transaksi kebijakan yang merugikan publik.

Pendanaan partai politik yang terbuka dan partisipatif menghadapi kondisi yang cukup tidak pasti perkembangannya setelah Inggris memilih opsi keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada Januari 2020. Bahkan, dianggap kemungkinan bagi terjadinya pergeseran dominasi klasik dua partai utama yang saling bersaing, yaitu partai konservatif dan partai buruh. Ini didasari oleh pula kemungkinan kejenuhan masyarakat Inggris terhadap model kerajaan yang selama ini digunakan dalam sistem pemerintahan monarki konstitusional demokrasi parlementer. Tetapi, kemungkinan ini masih sukar terwujud

karena pertimbangan sejarah panjang atas model kerajaan yang digunakan menjadi simbol kenegaraan yang telah tertanam kuat di Inggris, termasuk bagi setiap generasi masyarakatnya. Itu sebabnya, pola kepartaian dalam pengelolaannya, termasuk pendanaan politik partai-partainya, dalam jangka panjang di Inggris adalah cenderung masih menggunakan model kerajaan, bahkan setelah Ratu Elizabeth wafat di tahun 2023.

## **2. NEGARA FILIPINA**

Di negara Filipina partai politik harus menyerahkan laporan keuangan mereka secara reguler. Selain itu terkait donasi, dari korporasi dilarang untuk dilakukan. Meskipun petinggi perusahaan diperbolehkan memberikan donasi kepada kandidat atau partai (Philippine Center for Investigative Journalism, 2013). Pelarangan memberi donasi bagi partai juga berlaku kepada lembaga keuangan, lembaga pendidikan yang menerima subsidi negara, pegawai negeri sipil, dan anggota tentara negara.

Di Filipina, masih ada perdebatan panjang terkait subsidi politik. Berdasarkan proposal Undang-undang Pengembangan Partai Politik (*Senate Bill 3214*) yang mencakup rencana pemberian Dana Subsidi Negara senilai 350 juta PHP (I\$13,96 juta). Dana tersebut ditujukan untuk kegiatan kampanye dan pengeluaran rutin (pendidikan bersamaan, undang-undang juga membatasi kontribusi dari individu maupun perusahaan dan mengetatkan standar pelaporan keuangan. Subsidi

tersebut hanya akan diberikan apabila partai/kandidat bisa mencatat pemasukan sejumlah tersebut dari iuran anggota dan kontribusi masyarakat (Manila Times, 2012). Menurut Pusat Jurnalisme Investigatif Filipina mengungkapkan bahwa pada pemilu Mei 2010, hanya terdapat 308 individu (dari total 50,7 juta pemilih terdaftar) yang mendonasikan kekayaannya kepada kandidat presiden dan wakil presiden.

Di lain pihak, diterapkan juga pengaturan tentang pembatasan pengeluaran partai dikalkulasi per pemilih (5 peso [PHP] [I\$0,2]) di setiap daerah pemilihan di mana partai politik memiliki kandidat. Pengeluaran kandidat individual juga dibatasi. Namun, batas atas yang diterapkan bagi kandidat presidensial terlalu rendah sehingga tidak ada kandidat yang mematuhi regulasi tersebut, di mana komisi pemilihan umumnya sendiri mengakui bahwa regulasinya terlalu ketat. Sedangkan ongkos memasang iklan di media massa dan iklan kampanye harus dibiayai sendiri oleh partai/kandidat.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan regulasi keuangan kampanye selama periode pemilu Filipina mengupayakan pengaturan terkait penguatan regulasi pendanaan melalui pendanaan publik, mekanisme pengawasan dan pelaporan yang lebih kuat, pengelolaan partai yang lebih baik, dan pemberantasan 'pengkhianatan politik' (misalnya seorang kandidat segera beralih kepada partai lain setelah memenangi pemilu). Tetapi, segala capaian reformasi tersebut tetap

terbuka bagi segala tindak manipulasi. Oleh sebab itu, reformasi yang saling terkait menjadi penting.

Hal ini menarik karena di Filipina, partai dipandang sebagai jejaring personal yang tidak memiliki basis organisasi yang nyata. Oleh sebab itu, keanggotaan partai dalam jangka waktu lama merupakan konsep yang sangat aneh. Di Filipina, partai politik hanya dianggap sebagai kendaraan untuk meraih jabatan kepresidenan. Partai politik sering kali bergabung menjadi satu atau terpecah-belah dengan cepat, seperti tidak memiliki struktur yang permanen (Falguera *et al.*, 2016). Hal ini menyebabkan mengapa di Filipina juga terjadi praktik klientelisme yaitu banyak terdapat dinasti bisnis atau konglomerat yang dekat dengan kekuasaan. Di Filipina, partai-partai besar dikontrol oleh 'klan-klan' yang terdiri dari beberapa keluarga (Arlegue dan Coronel, 2003). Namun, sifat sistem politik yang informal semakin menyulitkan upaya pengawasan pendanaan partai dan kampanye pemilu. Kerangka kerja regulasi juga sering kali hanya ada di atas kertas (Gomez, 2012). Di Filipina, para elit di daerah atau kandidat yang berasal dari daerah pemilihan dengan satu kursi biasanya lebih berpengaruh daripada partai politik, yang kadang tidak memiliki kantor resmi dan struktur organisasi yang jelas (Olli, 2011).

#### **D. TRANSPLANTASI HUKUM DAN OPSI MODEL KEBIJAKAN**

Hak utama yang harus menjadi pedoman undang-undang mengenai

pendanaan partai politik adalah untuk mencegah korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Belajar dari Inggris, ditemukan prinsip-prinsip yang diperkuat dengan pengawasan praktik di lapangan meliputi adanya (1) keseimbangan yang masuk akal antara pendanaan publik dan swasta untuk memastikan bahwa partai politik memiliki sumber daya yang diperlukan tanpa terlalu bergantung pada kepentingan swasta; (2) kriteria yang adil dalam distribusi kontribusi negara kepada partai politik untuk mendorong kesetaraan persaingan di antara para pesaing; (3) aturan ketat mengenai sumbangan pribadi untuk mencegah pengaruh yang tidak semestinya dari donor yang kaya raya; (4) batasan pengeluaran partai politik terkait dengan kampanye pemilu untuk mengendalikan pengeluaran yang berlebihan potensinya mendistorsi proses demokrasi; (5) transparansi akun yang lengkap untuk memungkinkan pengawasan publik dan menumbuhkan kepercayaan pada sistem politik. Pembentukan otoritas audit independen berfungsi untuk memastikan pengawasan keuangan partai secara objektif dan tidak memihak; dan (6) dibutuhkan sanksi yang berarti bagi partai dan kandidat yang melanggar aturan untuk mencegah memberikan sanksi.

Persyaratan adanya keterbukaan mewajibkan partai politik untuk melaporkan rekening keuangan mereka dan mengungkapkan identitas donor. Pemantauan independen terhadap

pendanaan partai dan kampanye pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan untuk mendeteksi penyimpangan. Spesialisasi personel dalam pemberantasan pendanaan ilegal pada partai politik dan kampanye pemilu untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang menjunjung tinggi integritas proses politik yang menjamin persaingan yang sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.

Inggris bisa digolongkan sebagai negara demokrasi dengan partai politik dalam pengaturan keorganisasian dan keanggotaannya yang memiliki basis konsolidasi matang. Ini dikonstruksikan melalui sistem demokrasi parlementer yang menjunjung keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam hal pendanaannya. Meskipun di tingkat partai politik kelembagaannya banyak ditopang oleh para pebisnis yang kental dengan afiliasi ideologi masing-masing, tetapi bagi partai-partai yang menjalankan peran di *House of Commons* didukung oleh sistem pendanaannya masing-masing dari bantuan negara. Ini juga berlaku bagi partai-partai yang menjalankan peran politiknya di tingkat parlemen lokal dalam basis negara kesatuan (*unitary state*) yang dianut konstitusinya. Terdapat dinamika politik dalam pergeseran dominasi dua partai politik utama di Inggris, tetapi secara utuh perkembangan ke arah sistem kepartaian yang plural (multipartai),

pada kenyataannya tidak bisa lepas dari peran dominan kedua partai yang ada, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Sistem multi partai di Inggris dengan pola pendanaan politiknya secara tidak langsung menegaskan Inggris yang tetap menjunjung prinsip politik bernegara konstitusional yang menghargai keberagaman di tengah masyarakatnya secara terbuka dan partisipatif. Pola pendanaan demikian juga kuat mendorong sistem pemerintahan parlementer aristokrasi konstitusionalnya yang menjunjung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersikap keras dalam menggali pendanaan ilegal dan harus mendukung pemerintahan yang baik atau bebas korupsi.

Konstruksi sistem pendanaan di Inggris berkarakter terpisah dari organisasi partai dalam pengelolaan internalnya yang murni dari sokongan swasta, perorangan atau kelompok (ini utamanya para pebisnis) dan insentif negara bagi partai-partainya yang menjalankan di *House of Commons* melalui perannya terkait legislasi, anggaran, pengawasan parlemen, termasuk bagi partai oposisi. Tuntutan akuntabilitas dan larangan keras bagi pendanaan yang ilegal secara terbuka dan partisipatif, kiranya bisa diadopsi dalam UU Partai Politik di Indonesia juga pengaturan dalam bantuan negara bagi partai politik di peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Berkenaan dengan pendanaan politiknya, bagi Filipina, menunjukkan beberapa kecenderungan. *Pertama*,

terdapat peraturan yang membatasi jumlah uang yang dapat diterima oleh partai politik. *Kedua*, terdapat peraturan mengenai sumber dana. Sebagian besar mengandalkan iuran anggota sebagai sumber dana utama. Setelah itu sumbangan masyarakat dan terakhir barulah sumbangan perusahaan. *Ketiga*, pelarangan bagi partai politik untuk membuka unit usaha atau menanamkan modal dalam perusahaan. *Keempat*, pengaturan yang ketat terhadap sumbangan dari organisasi massa dan organisasi non-pemerintah.

Sementara itu, hal-hal yang diatur secara rinci dalam standar akuntansi keuangan Filipina di antaranya soal (i) sumber dana, yang diklasifikasikan berdasarkan iuran anggota, sumbangan perusahaan, subsidi dana publik, penggunaan fasilitas publik, sumbangan individual, sumbangan organisasi buruh dan sejenisnya, dan sumbangan pihak asing; (2) pembangunan unit usaha; (3) batasan jumlah biaya kampanye; (4) Pemisahan dana rutin dengan dana kampanye; (5) pengaturan dana rutin; (6) Keterbukaan laporan keuangan; (7) keterbukaan dana partai; serta (8) sanksi atas pelanggaran aturan.

Filipina juga melarang penggunaan fasilitas publik atau negara dalam kegiatan partai politik dan memberlakukan sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar aturan-aturan tersebut sanksi administratif ini dari mulai yang terberat seperti dibubarkannya partai, yang sedang seperti tidak diizinkan mengikuti Pemilu atau yang ringan seperti tidak

mendapatkan subsidi dari negara serta sanksi pidana melalui pengadilan pidana (Hafid, 2003).

## E. PENUTUP

Praktik baik yang dapat dicontoh dari pedoman pembiayaan partai politik dan kampanye pemilu untuk mencegah korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik antara lain di Inggris antara adalah perundang-undangan yang jelas dan tidak ambigu. Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik dan aktivitas keuangannya bersifat lugas dan tidak mengandung ketentuan yang bertentangan. Meskipun praktek pada kurun waktu tertentu, bisa ditemukan skandal keuangan melibatkan politisi, tetapi bangunan sistem politiknya yang transparan, partisipatif dan akuntabel masih relatif terjaga integritasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceron, J. (2009). It's the (Non-) system, stupid!: Explaining 'mal-development' of parties in the Philippines. Dalam *Reforming the Philippine Political Party System : Ideas and Initiatives, Debates and Dynamics* (pp. 5–18). Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/philippinen/07131.pdf>
- Aceron, J., & La Viña, A. G. M. (2018). Democratizing election through campaign finance reforms. Dalam R. U. Mendoza, E. L. Beja Jr., J. C. Teehankee, A. G. M. La Viña, & M. F. Villamejor-Mendoza (Eds.), *Building Inclusive Democracies in ASEAN* (pp. 297–321). World Scientific Publishing Company. [https://doi.org/10.1142/9789813236493\\_0016](https://doi.org/10.1142/9789813236493_0016)
- Amal, I. (Ed.). (2012). *Teori-teori mutakhir partai politik*. Tiara Wacana.
- Arlegue, C., & Coronel, J. J. S. (2002). Philippines. Dalam P. M. Manikas & L. L. Thornton (Eds.), *Political parties in Asia: Promoting reform and combating corruption in eight countries* (pp. 217–262). National Democratic Institute for International Affairs. <https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Political%20Parties%20in%20Asia%20Promoting%20Reform%20and%20Combating%20Corruption%20in%20Eight%20Countries.pdf>
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik* (7th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Electoral Commission. (n.d.). *Overview of party campaign spending*. Electoral Commission. [https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2022-11/Generic%20party%20spending%20updated%20Nov%202022\\_0.pdf](https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2022-11/Generic%20party%20spending%20updated%20Nov%202022_0.pdf)
- Falguera, E., Jones, S., & Ohman, M. (Eds.). (2014). *Funding of political parties and election campaigns: A handbook on political finance*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
- Forman, F. N. (1985). *Mastering British politics*. Macmillan Education Ltd.
- Gomez, E. T. (2012). *Monetizing politics*.

- Financing parties and elections in Malaysia. *Modern Asian Studies*, 46(5), 1370–1397. <https://www.jstor.org/stable/41683030>
- Gonzalez, E. T. (2003). Regulating campaign finance in the Philippines: Limits and challenges. *Philippine Journal of Public Administration*, XLVII(1–4), 276–301.
- Hellmann, O. (2011). *Political parties and electoral strategy: The development of party organization in East Asia*. Palgrave Macmillan.
- Hofmeister, W. (2022). Political parties shape democracy: Their role, performance, and organisation from a global perspective. Konrad-Adenauer-Stiftung Ltd. <https://www.kas.de/en/web/politikdialog-asien/single-title/-/content/political-parties-shape-democracy>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). *How democracies die* (Imprint ed.). Penguin.
- M, T. G. (n.d.). *Political parties in Britain* [Paparan]. <http://www.pompeicollege.in/english/pdf/ba-ivsem/POLITICAL%20PARTIES%20IN%20BRITAIN.pdf>
- Miranda, P. B. (2021). A disproportionately unequal playing field: Challenges to and for campaign finance law and policy in the Philippines. *Journal of Elections and Democracy*, 1(1), 51–64.
- Office of The Ombudsman. (2013). *Building the Philippine Political Party System*. Ombudsman.gov.ph. Retrieved December 18, 2023, from <https://www.ombudsman.gov.ph/UNDP4/wp-content/uploads/2013/03/KP4.-Primer-1-Building-the-Philippine-Political-Party-System.pdf>
- O’Neil, P. H., Fields, K. J., & Share, D. (2015). *Cases and concepts in comparative politics* (5th ed.). W. W. Norton & Company.
- UK Parliament. (n.d.). *Political parties in parliament*. UK Parliament. Retrieved November 6, 2023, from <https://www.parliament.uk/>
- Reyes, A. I. K., Rosales, B. M., & Yabut, M. M. (2021). Political party finance in the Philippines. Dalam *Political Party Finance Reform in Southeast-Asia* (pp. 133–170). Perlumdem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/The Association for Elections and Democracy). <https://perludem.org/2021/09/12/political-party-finance-reform-in-southeast-asia/>
- Reyes, J. A. L., Arce, B. G. C., & Madrid, N. B. N. (2018). Do money, power, family and connections really matter in politics? Analyzing factors of success in the 2010, 2013, and 2016 Philippine Senatorial Elections. *The Copenhagen Journal of Asian Studies*, 36(2), 28–51. <https://doi.org/10.22439/cjas.v36i2.5648>
- Scarrow, S. E. (2016). *The state of political finance regulations in Canada, the United Kingdom and the United States* [International IDEA Discussion Paper 11/2016]. idea.int. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-state-of-political-finance-regulations-in-canada-uk-usa.pdf>

Ufen, A. (2016). Asia (D. Rady, Trans.).  
Dalam E. Falguera, S. Jones, & M.  
Ohman (Eds.), *Pendanaan partai  
politik dan kampanye pemilu:  
Buku pedoman keuangan politik*  
(Terjemahan ed., pp. 89–137).  
International Institute for  
Democracy and Electoral Assistance.  
[https://perludem.org/2016/11/03/  
pendanaan-partai-politik-dan-  
kampanye-pemilu-buku-pedoman-  
keuangan-politik/](https://perludem.org/2016/11/03/pendanaan-partai-politik-dan-kampanye-pemilu-buku-pedoman-keuangan-politik/)